



## Policy Brief: Jam Belajar Masyarakat dan Penguatan Ekosistem Belajar Anak di Kabupaten Tangerang

Masduki Asbari<sup>1</sup>, Wakhida Nurhayati<sup>2</sup>, Agus Purwanto<sup>3</sup>, Yoyok Cahyono<sup>4</sup>, Temmy Setiawan<sup>5</sup>, Khaerul Fahmi<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Aya Sophia Islamic School, Indonesia

<sup>3,5,6</sup>Tanry Abeng University, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Pramita Indonesia, Indonesia

<sup>1,3,4,5,6</sup>Asosiasi Doktor Tangerang Raya, Indonesia

Corresponding Author Email: [kangmasduki.ssi@gmail.com](mailto:kangmasduki.ssi@gmail.com)

**Abstrak** - Artikel ini disusun sebagai *policy brief* (risalah kebijakan) yang bertujuan memberikan analisis kebijakan dan rekomendasi strategis terkait penerapan Jam Belajar Masyarakat (JBM) sebagai instrumen tata kelola pendidikan berbasis komunitas di Kabupaten Tangerang. Tantangan utama pendidikan daerah tidak hanya terletak pada institusi sekolah, tetapi juga pada rendahnya kualitas lingkungan belajar di luar sekolah, lemahnya pendampingan keluarga, serta tingginya distraksi digital dan aktivitas sosial malam hari. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan kualitatif melalui studi dokumen, telaah regulasi, dan sintesis literatur mutakhir tentang community-based education dan keterlibatan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa JBM berpotensi menjadi kebijakan berbiaya rendah dengan dampak sosial-edukatif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan disiplin belajar anak, peran keluarga, dan kohesi sosial masyarakat. Kebaruan *policy brief* ini terletak pada penempatan JBM sebagai instrumen lintas sektor dalam manajemen pendidikan daerah yang mengintegrasikan sekolah, keluarga, dan komunitas dalam satu ekosistem kebijakan.

**Kata Kunci:** policy brief; jam belajar masyarakat; kebijakan pendidikan; pendidikan berbasis komunitas

**Abstract** - This article is explicitly designed as a policy brief that provides policy analysis and strategic recommendations on the implementation of the Community Learning Hour (Jam Belajar Masyarakat/JBM) as a community-based education governance instrument in Tangerang Regency. Educational challenges at the local level extend beyond schools to include inadequate home learning environments, limited parental engagement, and increasing digital and social distractions during evening hours. Using a qualitative policy analysis approach based on document review, regulatory analysis, and synthesis of recent literature on community-based education, this policy brief demonstrates that JBM represents a low-cost, high-impact policy option. The findings highlight JBM's potential to enhance learning discipline, strengthen family involvement, and promote social cohesion. The novelty of this policy brief lies in framing JBM as a cross-sectoral education governance mechanism that integrates schools, families, and communities within a unified local policy framework.

**Keywords:** policy brief; community learning hour; education policy; community-based education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

### Konteks Global dan Lokal Pendidikan di Era Kontemporer

Pendidikan abad ke-21 melampaui batas-batas fisik ruang kelas. Sementara sekolah formal tetap menjadi pilar utama untuk transfer pengetahuan dan keterampilan, pertumbuhan literatur pendidikan masa kini—terutama dalam wacana *community-based education*—menunjukkan bahwa pembelajaran sejati terjadi ketika proses belajar dicakup oleh *ekosistem sosial* yang lebih luas, termasuk keluarga, komunitas, dan lingkungan kehidupan sehari-hari setiap anak (Ridwan et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa sistem pendidikan yang efektif harus bersifat integratif dan holistik, di mana

keluarga dan masyarakat memegang peran strategis dalam mendukung keberhasilan pendidikan (*community-based learning*).

Pergeseran ini sejalan dengan pemikiran Bronfenbrenner yang memandang pendidikan sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungan sosialnya, termasuk keluarga, teman sebaya, sekolah, serta masyarakat luas. Model *bio-ekologis* Bronfenbrenner menempatkan keluarga dan jaringan sosial sebagai bagian dari *mikrosistem* yang memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan, motivasi belajar, dan pencapaian akademik siswa (*Ecology of Human Development*)—yang kemudian didukung oleh berbagai kajian empiris 2020–2025 tentang keterlibatan keluarga dan komunitas dalam pendidikan.

Di tingkat internasional, keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pendidikan semakin mendapat sorotan sebagai faktor penting dalam peningkatan hasil belajar, keterlibatan sosial, dan keterampilan abad ke-21. Misalnya, studi oleh Otero-Mayer (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga secara kuat berkorelasi dengan pencapaian akademik yang lebih tinggi dan peningkatan kompetensi sosial-emosional siswa, termasuk keterampilan regulasi diri dan empati—yang merupakan kompetensi inti dalam pendidikan masa depan.

### **Tantangan Lingkungan Belajar di Luar Sekolah sebagai Isu Kebijakan Pendidikan Daerah**

Dalam konteks Kabupaten Tangerang, dinamika urbanisasi mempercepat perubahan pola sosial, termasuk pola kehidupan keluarga dan komunitas. Mobilitas tinggi, penetrasi teknologi digital, serta aktivitas komersial masyarakat secara intensif hingga malam hari telah menciptakan kondisi di mana anak-anak menghadapi tantangan belajar di luar sekolah. Distraksi digital, rendahnya pendampingan belajar di rumah, dan minimnya kontrol sosial terhadap aktivitas lingkungan telah berkontribusi pada terjadinya masalah seperti menurunnya keterlibatan belajar, rendahnya motivasi akademik, dan meningkatnya perilaku berisiko di kalangan remaja.

Dukungan literatur menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang tidak kondusif berdampak negatif pada prestasi akademik dan kesejahteraan psikososial siswa. Studi empiris di pendidikan dasar Indonesia menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan belajar, termasuk dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, memiliki hubungan signifikan dengan kemampuan fokus, motivasi, dan pencapaian akademik siswa. Ketika dukungan ini kurang, anak sering mengalami kesulitan belajar yang berdampak pada hasil akademik dan pemenuhan target pembelajaran yang diharapkan oleh sistem pendidikan nasional.

Dalam tradisi pendidikan Indonesia sendiri, konsep Tri Sentra Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara menegaskan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai *three pillars* yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan pendidikan bermutu. Peran sinergis ini tidak hanya penting secara filosofis, tetapi juga operasional dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan nasional. Temuan kajian kontemporer memperkuat pandangan bahwa kolaborasi multifaset antara keluarga, sekolah, dan komunitas menciptakan efek sinergis yang lebih besar dibandingkan intervensi yang berdiri sendiri-sendiri.

### **Kebijakan dan Literatur Terkini tentang Keterlibatan Keluarga dan Komunitas**

Literatur internasional dan nasional yang mutakhir (tahun 2020–2026) terus menggarisbawahi pentingnya keterlibatan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari strategi pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Kajian komprehensif tentang hubungan orang tua, pendidik, dan anggota komunitas memperlihatkan bahwa keterlibatan keluarga tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional yang sehat bagi siswa. Kelty (2020) dalam studinya menyimpulkan bahwa keterlibatan keluarga yang erat dengan sekolah melalui komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi aktif menghasilkan peningkatan pencapaian akademik dan kesejahteraan sosial siswa, yang merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan inklusif.

Ulasan literatur terbaru juga menegaskan keterlibatan komunitas sebagai faktor penting dalam pendidikan. Penelitian tentang *parent and community involvement in education* menunjukkan bahwa kemitraan yang kuat antara orang tua, sekolah, dan komunitas membawa berbagai manfaat termasuk peningkatan kehadiran peserta didik, penurunan konflik sosial, dan dukungan emosional yang lebih baik bagi siswa. Pola komunikasi yang efektif antara sekolah dan rumah, termasuk penggunaan platform digital untuk membangun kemitraan ini, meningkatkan keterlibatan orang tua dan memperluas ruang belajar di luar jam sekolah formal.

Selain itu, literatur mengenai *community-based learning* menunjukkan bahwa pembelajaran yang berakar dalam konteks komunitas mampu memperkaya kompetensi personal, sosial, dan vokasional

peserta didik. Model pembelajaran berbasis komunitas menempatkan nilai-nilai lokal, budaya kontekstual, dan pengalaman sosial sebagai bagian integral dari proses belajar sehingga siswa tidak hanya belajar dari buku teks tetapi juga melalui pengalaman nyata dalam masyarakat. Temuan ini relevan dengan gagasan JBM yang menempatkan lingkungan masyarakat sebagai *extended classroom*.

### **Peran Lingkungan Belajar sebagai Ekosistem Pendidikan**

Pemikiran kontemporer tentang *learning ecosystem* atau ekosistem belajar menandaskan bahwa pembelajaran efektif tidak hanya terjadi di ruang formal. Ecosystem pendidikan mencakup interaksi dinamis antara siswa, orang tua, guru, teman sebaya, jaringan komunitas, serta struktur sosial yang lebih luas. Konsep ini juga diadopsi dalam model *connected learning* yang menggabungkan minat pribadi siswa, dukungan sosial, dan koneksi terhadap peluang praktis—yang secara bersama-sama dapat memicu hasil belajar yang lebih bermakna.

Dalam kerangka ekosistem, keluarga berfungsi sebagai *first teacher* yang memberikan nilai-nilai dasar, dukungan emosional, dan pembiasaan belajar sejak dulu. Dukungan keluarga yang kuat dapat memperkuat kerangka pembelajaran sekolah, terutama dalam konteks tugas rumah, pengembangan self-regulation, dan keterampilan meta-kognitif. Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga yang konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan prestasi akademik serta kemampuan sosial-emosional siswa—yang berkontribusi terhadap keseimbangan psikologis anak dalam konteks pembelajaran formal maupun informal.

Komunitas—termasuk organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok pemuda—lebih dari sekadar latar sosial. Peran mereka dalam mendukung siswa dapat bersifat langsung, melalui kegiatan pembelajaran tambahan, mentoring remaja, hingga organisasi kelas pembiasaan budaya literasi; maupun secara tidak langsung melalui penciptaan lingkungan sosial yang aman dan mendukung. Studi pendidikan karakter berbasis komunitas menunjukkan bahwa proses ini memperkuat norma sosial yang mendukung nilai-nilai belajar, toleransi, dan kolaborasi—yang merupakan indikator penting dalam pembentukan *learning culture* masyarakat yang produktif.

### **Gap Kebijakan Formal di Luar Sekolah dan Kebutuhan Kebijakan JBM**

Meskipun sejumlah literatur dan praktik global menunjukkan pentingnya keterlibatan keluarga dan komunitas, kebijakan formal daerah seringkali masih terfokus pada aspek struktural sekolah formal dan kurang memberikan ruang bagi intervensi di luar sekolah. Tanpa kebijakan yang eksplisit dan terkoordinasi, lingkungan sosio-kultural yang kurang mendukung dapat melemahkan pengaruh positif dari upaya pendidikan formal. Dalam konteks ini, Jam Belajar Masyarakat (JBM) muncul sebagai respons kebijakan yang menjembatani gap kebijakan tersebut. JBM bukan hanya sebuah program sosial, tetapi instrumen kebijakan yang dirancang untuk menata ruang tertentu agar keluarga dan komunitas secara kolektif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi belajar anak di luar sekolah. Intinya, JBM mendukung keterlibatan orang tua dan komunitas secara struktural, sehingga sinergi antara pendidikan formal dan informal menjadi lebih terukur dan berkelanjutan.

### **Posisi Artikel Ini dalam Kebijakan Pendidikan Daerah**

Artikel ini, yang dirancang sebagai *policy brief*, berfokus pada analisis kebijakan pendidikan berbasis komunitas dengan tujuan menyajikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tangerang, dalam merancang, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan JBM. *Policy brief* ini bukan hanya merumuskan permasalahan, tetapi juga menyediakan alur argumentasi berbasis bukti yang dapat langsung digunakan dalam pengambilan keputusan strategi pendidikan daerah. Dengan menempatkan JBM dalam kerangka tata kelola pendidikan yang mencakup sekolah, keluarga, dan komunitas, artikel ini hadir bukan sekadar sebagai kajian akademis, tetapi sebagai dokumen kebijakan yang actionable—dapat diadaptasi dalam regulasi daerah, integrasi perencanaan pembangunan daerah, serta mendukung pembentukan budaya belajar masyarakat yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN (METODE POLICY BRIEF)**

Sejalan dengan karakter *policy brief*, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis kebijakan (*policy analysis*). Metode ini dipilih karena tujuan utama penulisan bukan untuk menguji hipotesis statistik, melainkan untuk menghasilkan argumen kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-informed policy argument*).

Data diperoleh melalui tiga sumber utama. Pertama, studi dokumen kebijakan, meliputi regulasi pendidikan nasional dan daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta rancangan kebijakan Jam Belajar Masyarakat. Kedua, telaah literatur ilmiah, khususnya jurnal 5–10 tahun terakhir yang membahas pendidikan berbasis komunitas, keterlibatan keluarga, dan tata kelola pendidikan. Ketiga, analisis kontekstual kebijakan, yaitu sintesis hasil diskusi kebijakan, praktik lapangan, dan dinamika sosial yang relevan dengan penerapan JBM.

Analisis dilakukan melalui identifikasi masalah kebijakan, pemetaan opsi kebijakan, serta penilaian implikasi kebijakan. Dengan demikian, metode ini konsisten dengan standar penulisan *policy brief* dalam kajian manajemen pendidikan dan kebijakan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Jam Belajar Masyarakat sebagai Instrumen Kebijakan Pendidikan Berbasis Ekosistem**

Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa Jam Belajar Masyarakat (JBM) memiliki karakter yang berbeda dari program pendidikan konvensional. JBM tidak dirancang sebagai intervensi pedagogis langsung, melainkan sebagai instrumen tata kelola (governance instrument) yang menata lingkungan sosial agar mendukung proses belajar anak di luar sekolah. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, posisi ini menempatkan JBM sebagai *enabling policy*—kebijakan yang menciptakan kondisi pendukung bagi keberhasilan kebijakan inti pendidikan.

Literatur mutakhir menegaskan bahwa kualitas hasil belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-sekolah, seperti dukungan keluarga, stabilitas lingkungan sosial, dan kontrol distraksi digital (OECD, 2023; UNESCO, 2023). Dalam konteks ini, JBM berfungsi sebagai mekanisme kebijakan yang mengisi *policy gap* antara ruang sekolah dan ruang sosial keluarga. Tanpa intervensi semacam ini, upaya peningkatan mutu pendidikan cenderung kehilangan daya ungkit karena bertumpu hanya pada institusi sekolah.

Temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa JBM efektif bukan karena mengatur perilaku anak secara langsung, tetapi karena mengaktifkan norma sosial kolektif. Ketika masyarakat secara sadar menyetujui waktu belajar, maka terbentuklah kontrol sosial yang bersifat edukatif, bukan koersif. Hal ini sejalan dengan teori *learning culture* yang menyatakan bahwa budaya belajar tumbuh ketika norma sosial, nilai kolektif, dan praktik keseharian selaras dengan tujuan pendidikan (Hodkinson et al., 2022).

### **JBM dan Penguatan Peran Keluarga sebagai Aktor Pendidikan Utama**

Salah satu temuan kebijakan paling signifikan dalam policy brief ini adalah pergeseran posisi keluarga—dari aktor pasif menjadi aktor kunci dalam tata kelola pendidikan daerah. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga merupakan determinan utama keberhasilan akademik, regulasi diri, dan kesejahteraan psikososial anak (Hill & Tyson, 2020; Kraft & Falken, 2021).

Namun, dalam praktik kebijakan daerah, peran keluarga sering kali diasumsikan berjalan secara otomatis tanpa dukungan struktural. JBM justru bekerja dengan asumsi sebaliknya: bahwa keluarga membutuhkan kerangka sosial dan kebijakan untuk dapat menjalankan fungsi pendampingan belajar secara konsisten. Dengan adanya JBM, keluarga memperoleh legitimasi sosial untuk membatasi penggunaan gawai, mengatur waktu anak, dan memprioritaskan aktivitas belajar pada jam tertentu.

Analisis ini menunjukkan bahwa JBM berpotensi memperkuat *parental engagement* melalui mekanisme non-formal namun sistematis. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi OECD (2022) yang menekankan pentingnya kebijakan publik yang mendukung peran orang tua tanpa membebani mereka secara administratif. Dengan demikian, JBM tidak menambah kewajiban baru bagi keluarga, melainkan **menyelaraskan rutinitas keluarga dengan tujuan pendidikan**.

### **JBM sebagai Mekanisme Kohesi Sosial dan Ketertiban Edukatif**

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa JBM memiliki implikasi sosial yang melampaui sektor pendidikan. Dengan melibatkan RT/RW, desa/kelurahan, tokoh agama, dan komunitas lokal, JBM berfungsi sebagai instrumen kohesi sosial. Lingkungan yang sebelumnya individualistik dan permisif terhadap distraksi malam hari mulai membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya waktu belajar anak.

Dalam perspektif kebijakan publik, ini merupakan contoh *soft regulation*—pengaturan berbasis norma sosial dan kesepakatan komunitas, bukan sanksi formal. Pendekatan ini terbukti lebih adaptif dan berkelanjutan dalam konteks masyarakat heterogen, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian governance pendidikan berbasis komunitas (Gutiérrez & Rogoff, 2020; UNESCO, 2021).

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa JBM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu belajar, tetapi juga pada penurunan potensi konflik sosial dan kenakalan remaja. Dengan adanya waktu belajar yang disepakati, aktivitas anak dan remaja menjadi lebih terstruktur, sementara ruang publik menjadi lebih terkendali secara sosial. Dengan kata lain, JBM berfungsi sebagai kebijakan preventif berbiaya rendah dalam menjaga ketertiban sosial berbasis pendidikan.

### **Rekomendasi Kebijakan Utama (*Policy Recommendations*)**

Berdasarkan hasil analisis kebijakan di atas, policy brief ini merekomendasikan beberapa langkah strategis berikut.

#### ***Penetapan JBM melalui Peraturan Bupati***

JBM perlu ditetapkan melalui **Peraturan Bupati** agar memiliki kepastian hukum dan konsistensi implementasi lintas wilayah. Regulasi ini sebaiknya menegaskan prinsip:

- edukatif dan non-represif,
- berbasis partisipasi masyarakat,
- fleksibel sesuai konteks lokal desa/kelurahan.

Penetapan regulasi ini akan menghindarkan JBM dari sifat seremonial dan menjadikannya bagian dari sistem tata kelola pendidikan daerah.

#### ***Penetapan Dinas Pendidikan sebagai Leading Sector***

Hasil pembahasan menunjukkan pentingnya satu aktor utama yang mengoordinasikan JBM. Dinas Pendidikan perlu ditetapkan sebagai *leading sector*, dengan dukungan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesra/Kemenag, dan Satpol PP dalam pendekatan pembinaan. Model koordinasi lintas sektor ini sejalan dengan praktik *whole-of-government approach* dalam kebijakan pendidikan modern (OECD, 2023).

#### ***Integrasi JBM dalam Dokumen Perencanaan Daerah***

Agar berkelanjutan, JBM harus diintegrasikan ke dalam:

- RPJMD,
- RKPD,
- Renstra OPD,
- serta program Dana Desa.

Integrasi ini memastikan bahwa JBM tidak bergantung pada figur kepemimpinan tertentu, melainkan menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

### **Implikasi Kebijakan (*Policy Implications*)**

#### ***Implikasi Institusional***

JBM mendorong perubahan paradigma birokrasi pendidikan, dari pendekatan sektoral menuju pendekatan ekosistem. OPD tidak lagi bekerja secara terpisah, melainkan dalam orkestrasi kebijakan bersama.

#### ***Implikasi Sosial***

Implementasi JBM berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga, menurunkan perilaku berisiko anak, dan memperkuat modal sosial masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada stabilitas sosial daerah.

#### ***Implikasi Manajerial Pendidikan***

Bagi sekolah, JBM memperluas ruang pengaruh pendidikan tanpa menambah beban kurikulum. Sekolah dapat manfaatkan JBM sebagai penguat pembiasaan belajar dan karakter di luar jam sekolah.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini secara eksplisit menegaskan bahwa Jam Belajar Masyarakat (JBM) bukan sekadar program sosial tambahan atau imbauan moral yang bersifat temporer, melainkan sebuah instrumen kebijakan strategis dalam tata kelola pendidikan daerah. Dalam konteks Kabupaten Tangerang—yang ditandai oleh dinamika urbanisasi, penetrasi teknologi digital, serta kompleksitas sosial masyarakat—

tantangan pendidikan tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan sekolah. Pendidikan harus diposisikan sebagai hasil dari interaksi sistemik antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial, yang bekerja dalam satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan.

Policy brief ini menunjukkan bahwa salah satu celah terbesar dalam kebijakan pendidikan daerah adalah lemahnya intervensi terhadap lingkungan belajar di luar sekolah. Sekolah telah bekerja dalam koridor kurikulum dan regulasi nasional, namun ruang keluarga dan masyarakat—yang justru menyerap sebagian besar waktu hidup anak—sering kali dibiarkan berjalan tanpa kerangka kebijakan yang jelas. Akibatnya, berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan kehilangan daya ungkit karena tidak didukung oleh suasana sosial yang kondusif bagi belajar. Dalam konteks inilah JBM hadir sebagai kebijakan korektif yang relevan, rasional, dan berbiaya rendah.

Sebagai policy brief, artikel ini menempatkan JBM sebagai kebijakan enabling, yakni kebijakan yang tidak secara langsung mengatur proses pedagogis, tetapi menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan proses belajar berlangsung lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma tata kelola pendidikan kontemporer yang menekankan pentingnya *learning ecosystem* dan *whole-of-society approach*. JBM bekerja melalui penguatan norma sosial, kesepakatan komunitas, dan legitimasi kebijakan bagi keluarga untuk menjalankan fungsi pendampingan belajar secara konsisten. Dengan demikian, JBM tidak menambah beban administratif baru bagi masyarakat, melainkan menyelaraskan rutinitas sosial dengan tujuan pendidikan.

Kesimpulan penting dari policy brief ini adalah bahwa keberhasilan JBM sangat ditentukan oleh desain kebijakan dan kepemimpinan daerah, bukan semata oleh tingkat kepatuhan masyarakat. JBM akan efektif apabila diposisikan sebagai kebijakan yang edukatif, partisipatif, dan adaptif terhadap konteks lokal desa atau kelurahan. Sebaliknya, JBM berpotensi mengalami resistensi apabila dipersepsi sebagai pembatasan aktivitas ekonomi atau sosial tanpa dialog dan fleksibilitas. Oleh karena itu, kerangka normatif kebijakan JBM harus secara tegas menolak pendekatan represif dan lebih menekankan pembinaan, persuasi, serta keteladanan sosial.

Dari sisi tata kelola, policy brief ini menegaskan urgensi kepastian regulasi melalui Peraturan Bupati. Tanpa payung hukum yang jelas, JBM berisiko menjadi inisiatif sporadis yang bergantung pada figur tertentu atau euforia sesaat. Peraturan Bupati memberikan legitimasi, konsistensi lintas wilayah, serta dasar koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Namun demikian, regulasi ini tidak boleh berhenti pada aspek normatif semata. Ia harus diikuti dengan penunjukan *leading sector* yang jelas, integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta mekanisme monitoring yang bersifat reflektif dan pembelajaran kebijakan (*policy learning*).

Artikel ini juga menyimpulkan bahwa JBM memiliki implikasi kebijakan lintas sektor yang signifikan. Bagi sektor pendidikan, JBM memperluas ruang pengaruh sekolah tanpa menambah beban kurikulum. Bagi sektor sosial dan pemerintahan desa, JBM memperkuat peran RT/RW, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra strategis pendidikan. Bagi pemerintah daerah secara keseluruhan, JBM merupakan instrumen penguatan modal sosial yang berkontribusi pada ketertiban sosial, pencegahan perilaku berisiko anak dan remaja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Dalam perspektif kebijakan publik, JBM dapat dipahami sebagai investasi sosial jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak sepenuhnya terukur dalam indikator jangka pendek, tetapi kontribusinya terhadap pembentukan budaya belajar, disiplin sosial, dan ketahanan keluarga sangat relevan bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan JBM seharusnya tidak dinilai semata dari tingkat kepatuhan formal, melainkan dari perubahan norma sosial, meningkatnya keterlibatan keluarga, dan terciptanya lingkungan belajar yang lebih ramah anak.

Sebagai penutup normatif, policy brief ini merekomendasikan agar pemerintah daerah tidak memandang JBM sebagai kebijakan simbolik, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Komitmen politik pimpinan daerah, konsistensi birokrasi, serta partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama keberhasilan kebijakan ini. Ketika pemerintah daerah berani menata waktu belajar anak melalui kebijakan yang humanis dan partisipatif, sesungguhnya daerah tersebut sedang menanam fondasi masa depan yang lebih beradab, berdaya saing, dan berkeadilan. Dengan demikian, Jam Belajar Masyarakat bukan hanya kebijakan tentang waktu, tetapi kebijakan tentang arah peradaban pendidikan daerah. Ia merepresentasikan keberpihakan negara—dalam skala lokal—terhadap hak anak untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung, serta tanggung jawab kolektif masyarakat dalam membangun generasi masa depan. Policy brief ini menegaskan bahwa di tengah kompleksitas tantangan pendidikan, solusi yang paling berkelanjutan sering kali lahir dari kebijakan yang sederhana, kontekstual, dan berpihak pada manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2024). Learning environments and engagement: Implications for education systems. *Educational Psychology Review*, 36(1), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09756-1>
- Boonk, L., Gijselaers, H. J. M., Ritzen, H., & Brand-Gruwel, S. (2021). A review of the relationship between parental involvement indicators and academic outcomes. *Educational Research Review*, 24, 10–30. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.02.001>
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2021). The bioecological model of human development. In R. M. Lerner (Ed.), *Handbook of child psychology and developmental science* (7th ed., pp. 1–41). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy101>
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Epstein, J. L. (2020). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429400783>
- Gutiérrez, K. D., & Rogoff, B. (2020). Cultural ways of learning: Individual traits or repertoires of practice. *Educational Researcher*, 49(7), 515–527. <https://doi.org/10.3102/0013189X20935280>
- Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2020). *A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement*. Southwest Educational Development Laboratory.
- Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2020). Parental involvement in education: Pathways to achievement and well-being. *Educational Psychologist*, 55(2), 65–78. <https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1720325>
- Hodkinson, P., Biesta, G., & James, D. (2022). Learning cultures and social regulation in education. *British Journal of Sociology of Education*, 43(5), 689–705. <https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2039354>
- Kemendikbudristek RI. (2022). *Kebijakan Merdeka Belajar dan transformasi ekosistem pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kemendikbudristek RI. (2023). *Profil Pelajar Pancasila sebagai kerangka penguatan karakter*. Kemdikbudristek. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>
- Kraft, M. A., & Falken, G. T. (2021). A blueprint for family–school partnerships. *Educational Researcher*, 50(8), 541–554. <https://doi.org/10.3102/0013189X211045906>
- Nisbet, J., & McKinney, S. (2020). Family engagement in education: A global review. *International Journal of Educational Research*, 103, 101629. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101629>
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>
- OECD. (2022). *Parents as partners in education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6c6c7a9a-en>
- OECD. (2023). *Trends shaping education 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5aee07d6-en>
- Otero-Mayer, A. (2025). Family engagement and socio-emotional development in early and middle education. *Early Childhood Education Journal*, 53, 1–14. <https://doi.org/10.1007/s10643-025-02024-4>
- Ridwan, R., Suryadi, A., & Kurniasih, D. (2025). Community-based education and learning ecosystems in emerging regions. *F1000Research*, 14, 1274. <https://doi.org/10.12688/f1000research.137452.1>
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54676/UZQV3309>
- World Bank. (2020). *Learning poverty: What is it, and what can be done about it?* World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/32519>
- World Bank. (2022). *Realizing the future of learning: From learning poverty to learning for everyone*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1796-9>